



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH**

Jalan Soekarno-Hatta No. 3 Kota Sawahlunto Kode Pos 27424
Telp (0754) – 61703, 62389, 61107
e-mail : bpkad@sawahluntokota.go.id

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024**



" BPKAD TAHUN 2023 "

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto untuk periode Perubahan APBD 2023 merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang merujuk kepada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto. Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berdasarkan kepada kondisi, potensi, dan permasalahan serta kebutuhan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang pada akhirnya akan bermuara kepada keluaran (output) dan hasil (outcome) yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Disamping itu Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Semester I Tahun 2023 dan mengacu pada Perubahan Renstra dan RKPD tahun berkenaan. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagai salah satu Perangkat Daerah, yang memiliki tanggungjawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengelolaan keuangan sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Sawahlunto berkewajiban membuat dan

memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang disusun dengan mengacu pada RKPD, dan Renstra OPD.

Selanjutnya, Dokumen Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 memuat Program/ kegiatan tahun 2023, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2024.

Dalam prosesnya penyusunan Renja OPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahap, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Renja memiliki arti strategis sebagai berikut :

1. Renja merupakan program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun berikutnya.
2. Renja merupakan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya yang mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
3. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2023.
4. Renja perangkat daerah merupakan Dokumen yang secara substansial merupakan terjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja Perangkat daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tujuan dan sasaran Renja yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra perangkat daerah.

5. Renja perangkat daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sampai tahun 2023 yang merupakan tahun kelima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis (Renstra)

Untuk dapat mewujudkan visi Pemerintah Daerah “ **Terwujudnya Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Transparan dan Akuntabel untuk Kelancaran Penyelenggara Pemerintahan**” dan Misi Ke-4 “**Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif**” maka dalam melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto menyusun perubahan rencana kerja tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto tahun 2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1981):

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefiksi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Maksud dari penyusunan Dokumen Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD dalam pengelolaan keuangan daerah tahun rencana 2023.

serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk dimasukkan dalam dokumen KUA-PPAS Tahun 2023 yang nantinya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja adalah:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) kedalam program kegiatan dan sub kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Sebagai pengendali dan pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD BPKAD untuk periode 1 (satu) tahun dimulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 agar tercapai target sasaran perubahan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan.
3. Sebagai dasar untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan sebagai sarana evaluasi pemilihan program dan kegiatan prioritas dalam mengambil kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Untuk mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistimatika Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN BERJALAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah semester I Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto merupakan unsur penunjang dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun dasar hukum terkait tugas pokok dan fungsi BPKAD diatur dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BAdan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota, yang secara umum tugas BPKAD adalah membantu Walikota dalam hal penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pengelolaan aset daerah.

Sesuai tugas pokok dan fungsi tersebut, maka BPKAD melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pelayanan dalam rangka proses penganggaran pendapatan dan penganggaran belanja daerah, pelayanan proses pencairan dana belanja, pelayanan dalam pengelolaan barang milik daerah serta pelayanan dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai target RENSTRA, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pencapaian target kinerja dinilai melalui standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan berupa indikator dan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Pelaksanaan Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto sampai dengan semester I Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.1.1 berikut :

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Semester I tahun 2023) Kota Sawahlunto

OPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto

Kode	Usuran/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
5	UNSUBSIDIARIS									
5 02	UNSUBSIDIARIS KEUANGAN									
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN)	12		-			12		
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan OPD (bulan)	12		-			12		
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah program dan kegiatan OPD sesuai perencanaan (dokumen)			-			1		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1						1	
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah program dan kegiatan OPD sesuai perencanaan (dokumen)			-			1		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1							
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan laporan tahunan yang tersusun (laporan)			-			2		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	2				-		1	

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target: Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan)	49		12	12	100.00%	13		
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang difasilitasi (bulan)			12	12	100.00%	13		
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	49						42	
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya laporan barang milik daerah pada SKPD (bulan)	12					12		
5 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang OPD yang tersusun (bulan)						12		
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD (laporan)	2						1	
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Yang Meningkat SDM nya (%)	42		34	20	58.82%	85		
5 02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pejabat eselon yang wajib menyampaikan laporan kinerja (orang)						22		
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	12						6	
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)			34	20	58.82%	20		
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	20						14	
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	12		12	12	100.00%	12		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (bulan)			12	12	100.00%	12		
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	12						6	

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (unit)			6	8	133.33%	4		
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	5							
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	12		12	12	100.00%	12		
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Sekretariat (orang)			9	9	100.00%			
		Jasa Surat menyurat yang disediakan (bulan)			12	12	100.00%	12		
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12						6	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Bulan)			12	12	100.00%	12		
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12						6	
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium cleaning service (orang)			-			2		
		Honorarium Non PNS/Staf Administrasi umum BPKAD (orang)			-			27		
		Honorarium programmer/IT BPKAD (orang)			-			1		
		Honorarium tenaga pengamanan aset (orang)			-			2		
		Jumlah Non PNS BPKAD yang dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, JKK dan JKM (orang)			-			31		
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12						6	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bulan)	12		12	12	100.00%	12		
		Barang Milik Daerah yang Dipelihara (bulan)	12		12	12	100.00%	12		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas Roda empat dan roda dua yang dipelihara (bulan)			12	12	100.00%	12		
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Gedung Kantor yang dipelihara (bulan)	20						10	
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang dipelihara (bulan)			12	12	100.00%	12		
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (unit)	2							
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (bulan)			12	12	100.00%	12		
		Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipeliharaan / direhabilitasi (unit)	30						15	
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)	WTP		WTP	WTP	WTP	WTP		
		PERSENTASE CAPAIAN REALISASI BELANJA (QUALITY OF BUDGET PLANNING (%))	90		90	92	102.22%	90		
		MAKSIMAL DEFISIT APBD (%)	4,1		0	0	100.00%	4,1		
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (dokumen)	2		2	2	100.00%	2		
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disusun (dokumen)	2		2	2	100.00%	2		
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang di review (Laporan)			1	1	100.00%			
		Jumlah Berita Acara verifikasi RKA SKPD (Berita Acara)						26		
		Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	27						27	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang di review (Laporan)			1	1	100.00%			
		Jumlah Berita Acara verifikasi Perubahan RKA SKPD (Berita Acara)						26		
		Jumlah Perubahan RKA - SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	27						27	
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang di review (SKPD)			1	1	100.00%			
		Jumlah Berita Acara verifikasi DPA SKPD (Berita Acara)						26		
		Jumlah DPA - SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	27						27	
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang di review (SKPD)			1	1	100.00%			
		Jumlah Berita Acara verifikasi Perubahan DPA SKPD (Berita Acara)						26		
		Jumlah Perubahan DPA - SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	27						27	
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen APBD (dokumen)			6	6	100.00%	6		
		Jumlah Perda dan Perwako APBD (dokumen)			2	2	100.00%	2		
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2							
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perubahan APBD (dokumen)			6	6	100.00%			
		Jumlah Perda dan Perwako Perubahan APBD (dokumen)			5	5	100.00%	2		
		Jumlah Perwako Perubahan Penjabaran APBD (dokumen)						3		
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5						3	

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Honorarium Non PNS/Staf Bidang Anggaran (orang)			3	3	100.00%			
		Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga dan Petunjuk Teknis Penyusunan RKA (Dokumen)			2	2	100.00%			
		Jumlah Peserta Sosialisasi Penganggaran Daerah dan Penyerahan DPA (orang)			500	240	48.00%			
		Jumlah dokumen petunjuk Teknis Penyusunan RKA (dokumen)			-			2		
		Jumlah dokumen Standar Biaya (dokumen)			-			2		
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	9						4	
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah (laporan)			-			1		
		Jumlah Peserta Sosialisasi Penganggaran Daerah dan Penyerahan DPA (orang)			-			80		
		Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	150						30	
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai aturan (%)	100		100	100	100.00%	100		
		Persentase Capaian Realisasi Anggaran (%)	90		90	85	94.44%	90		
		Persentase penyelesaian terhadap temuan LHP keuangan oleh Pemeriksaan BPK (%)			75	75	100.00%			
		Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan berpredikat baik (%)			60	60	100.00%			
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Ketersediaan Dana Pelaksanaan APBD (bulan)			12	12	100.00%			
		Laporan Rekonsiliasi Kas Daerah (laporan)						12		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelola Kas Daerah (Dokumen)	12						6	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan (SPD)			87	76	87.36%	78		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (dokumen)	78							
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan dana transfer (laporan)			28	28	100.00%			
		Jumlah laporan pengelolaan dana transfer (laporan)						105	78	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya (Dokumen)	105							
5 02 02 2.02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah laporan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank (laporan)						2	1	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	2						1	
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan kasde, aliran kas, PFK (bulan)			12	12	100.00%			
		Jumlah laporan aliran kas dan PFK (laporan)						12		

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)		
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	12						6			
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan gaji dan rekapitulasi SKIPP (bulan)	12	12	100.00%	12		
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan dengan OPD (OPD)		26	26	100.00%	26		
					Jumlah SP2D yang diproses (buah)		6750	4476	66.31%			
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait (Dokumen)	27				27		
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah SPM GU OPD yang diverifikasi (dokumen)	800	840	105.00%			
					Jumlah Dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan yang diterbitkan (dokumen)		10	9	90.00%	10		
					Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)		80	80	100.00%	150		
					Jumlah SP2B yang diterbitkan (SP2B)					372		
					Jumlah SP2D yang diterbitkan (SP2D)					6500		
					Jumlah SPM UP, GU, TU dan LS OPD yang diverifikasi (berkas)		800	840	105.00%	7500		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	13						6	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota (Orang)	300						80	
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	100		100	100	100.00%	100		
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100		100	100	100.00%	100		
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah laporan SAKD (laporan)			3	3	100.00%			
		Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah (laporan)						2		
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	2					1		
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi dan verifikasi (berita acara)			-			312		
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	312						54	
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi (laporan)			12	12	100.00%			
		Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Kota (laporan)						12		

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	27						27	
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Bidang Perbendaharaan (orang)			2	2	100.00%			
		Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah (dokumen)			6	6	100.00%	5		
		Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	6						6	
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang terselesaikan (dokumen)			-				1	
		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1							
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan Hasil Tindak Lanjut TPKD (laporan)			2	2	100.00%			
		Laporan Hasil Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR) (laporan)			-			4		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	4							

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Perwako kebijakan dan sistem akuntansi yang tersusun (dokumen)			-			2		
		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	2							
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)			104	90	86.54%	140		
		Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota (Orang)	140						26	
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa (%)	100		100	100	100.00%	100		
		Realisasi Penyaluran Pembayaran Pinjaman Pemda (%)	100		100	100	100.00%	100		
5 02 02 2.04 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman Pemda (kali)			2	2	100.00%			
		Jumlah pembayaran bunga utang pinjaman pemda kepada pemerintah RI						2		
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	2						1	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa (Desa)			27	27	100.00%			
		Jumlah bantuan keuangan dana desa dan alokasi dana desa yang disalurkan kepada desa (desa)						27		
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	12						6	
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah OPD yang mengajukan Dana Darurat (OPD)			3	3	100.00%			

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah OPD yang mengajukan belanja tidak terduga (OPD)						4		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12						7	
5 02 02 2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Desa (Desa)		27	27	100.00%			
		Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang disalurkan kepada Desa (Desa)						27		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota (Laporan)	12						6	
5 02 02 2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Data Base Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (tahun)		4	4	100.00%	4		
5 02 02 2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Aplikasi Keuangan Daerah yang dikelola (aplikasi)		4	4	100.00%			
		Jumlah aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang dikelola (aplikasi)						4		
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5						2	
5 02 03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE OPD DENGAN LAPORAN BMD YANG AKURAT DAN AKUNTABEL (%)	95	90	88	97.78%	94		
5 02 03 2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pencatatan dan pelaporan BMD sesuai aturan (%)	90	90	90	100.00%	90		
			Persentase penyelesaian terhadap temuan LHP BMD oleh Pemeriksaan BPK (%)	90	90	90	100.00%	90		
5 02 03 2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang yang disusun (dokumen)		1	1	100.00%	1		
		Jumlah Standar Harga yang Disusun (dokumen)	2						1	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Rencana Pemeliharaan/Perawatan BMD yang disusun (dokumen)			1	1	100.00%	1		
		Jumlah dokumen RK/BMD yang disusun (dokumen)			1	1	100.00%	1		
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2						1	
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi kebijakan pengelolaan BMD yang ditetapkan (dokumen)			-			5		
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2							
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Akuntansi BMD (laporan)			25	25	100.00%			
		Jumlah Laporan Penatausahaan BMD (laporan)	18					18	18	
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Bidang Aset (orang)			6	6	100.00%			
		Jumlah Aset Yang diregistrasi (unit)			25	20	80.00%			
		Jumlah Dokumen Bukti Kepemilikan Aset Pemda yang diterbitkan (dokumen)			-			25		
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD (Laporan)	1						1	
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang direhab (Unit)			2	3	150.00%	2		
		Jumlah PAD dari hasil pelelangan aset (juta rupiah)			50	202.47	404.94%	50		
		Jumlah rumah dinas dan gedung lainnya yang direhab (unit)			3	3	100.00%	2		
		Jumlah sewa tanah dan bangunan yang dibayarkan (objek perjanjian)			9	6	66.67%	9		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD (Laporan)	1						1	
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD (berita acara)	26						26	
		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD (Laporan)	26							

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus dan pengelola barang OPD yang meningkat pergetahuannya (orang)						52		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah kabupaten / Kota (orang)	62						60	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN (FISKAL SPACE) (%)	100		100	100	100.00%	100		
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian target PAD (%)	95		95	95	100.00%	95		
		Persentase capaian target PAD dari PBB-P2 dan BPHTB (%)	3.5		2.5	3.3	132.00%	2.5%		
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen potensi pajak daerah (dokumen)			-			2		
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1							
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen data kebijakan, data objek dan subjek PBB-P2 dan DHKP (dokumen)			38	38	100.00%			
		Jumlah Laporan PBB dan BPHTB (laporan)			15	15	100.00%			
		Jumlah dokumen Perda/Perwako Kebijakan pajak daerah (dokumen)						2		
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1						1	
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Peysbarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Media Penyebarluasan Informasi (Media)		12	3	2	66.67%	4		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	1	12					1	
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan (jenis)		12	4	4	100.00%	1		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1	12						
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Objek Pajak dan Subjek PBB-P2 (objek pajak)		12	27200	27200	100.00%	27.350		

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah (laporan)		12	12	12	100.00%	12		
		Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	12					6	
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2 dan BPHTB yang dipelihara dan dimutakhirkan (objek pajak(OP)		12	27200	27200	100.00%			
		Jumlah dokumen database Pendapatan daerah (dokumen)		12	1	1	100.00%			
		Jumlah Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA MINERBA (laporan)		12	4	4	100.00%			
		Jumlah Sistem Aplikasi Pendapatan yang dikelola (aplikasi)		12	1	1	100.00%	3		
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1						1	
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Nilai PBB-P2 dan BPHTB (miliar)			1.85	1.81	97.84%			
		Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)		12						
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Wajib Pajak (laporan)		1	12	12	100.00%			
		Jumlah wajib pajak BPHTB yang ditetapkan (wajib pajak)		8				200		
		Jumlah wajib pajak daerah yang ditetapkan (wajib pajak)		12				440		
		Jumlah wajib pajak PBB yang ditetapkan (wajib pajak)		12				27,350		
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	37	12					37	
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan pajak dan Konsultasi Pajak Daerah (bulan)		15	12	12	100.00%			
		Jumlah laporan pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (laporan)		6	-			12		

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	12	38					6	
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Bidang PBB (orang)			3	3	100.00%			
		Jumlah Data objek pajak dan subjek PBBP2 dan BPHTB yang diperiksa (objek pajak)			27200	27200	100.00%			
		Jumlah Laporan Pendapatan Daerah (laporan)		38	12	12	100.00%			
		Persentase data objek pajak dan subjek PBB P2 dan BPHTB yang terverifikasi (%)			-			100		
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	400						227	
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Bidang Pendapatan (orang)		2	4	4	100.00%			
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan (kali)		16	12	12	100.00%			
		Jumlah Penerimaan BPHTB (juta)		1	700	661.44	94.49%			
		Jumlah Penerimaan PBB (miliar)		1	1.1	1.06	96.36%			
		Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah (milyar)		1	50	51.47	102.94%			
		Jumlah Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah (miliar)		6				5.7		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12	5					3	
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase kasus keberatan atas pajak daerah yang terselesaikan (%)						100		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	10							
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah (laporan)						13		
		Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	2							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)

Tahun Anggaran 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada awal APBD Kota Sawahlunto mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.69.065.428.632,- dengan realisasi sampai semester I tahun 2023 sebesar Rp.37.599.905.618,- atau 54.44 % dan anggaran pembiayaan sebesar Rp. 1.666.666.669 dengan realisasi Rp. 203.000.000,- atau 12.18%

Anggaran Belanja sebesar Rp. 69.065.428.632,- tersebut terdiri dari :

1. Belanja Operasi

Berdasarkan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek dengan anggaran sebesar Rp. 12.549.720.167,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.073.052.589,- atau 48,39%

Belanja Operasi pada OPD BPKAD terdiri dari :

- **Belanja Pegawai** merupakan belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan ASN dengan anggaran sebesar Rp.6.414.766.683,- terealisasi sebesar Rp. 3.416.813.729,- atau 53,26%

- **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain seperti Belanja ATK, cetak dan penggandaan, belanja pemeliharaan, belanja sewa, honorarium PNS/Non PNS/Narasumber/tenaga ahli.

Anggaran yang tersedia sebesar Rp.4.884.953.484 dengan realisasi sebesar Rp2.103.451.465,- atau 43,06%

- **Belanja Modal**

Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang meliputi Belanja modal pengadaan kendaraan roda empat perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.964.148.000,- belum teralisasi

- **Belanja Bunga**

Belanja Bunga berupa belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah kepada Pemerintah Pusat atas penerusan pinjaman. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.250.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 552.787.395 atau 44.22%

2. **Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pada tahun 2023 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 3.382.909.465,- terealisasi Rp. 491.924.571,- atau 14,54%

3. **Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan belanja transfer dari pusat, yang digunakan untuk Belanja Bantuan keuangan umum daerah Provinsi/kab/kota kepada desa terdiri dari Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Desa (ADD) serta belanja bagi hasil desa terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Pada tahun 2023 dana transfer dianggarkan sebesar Rp.52.168.651.000,- dengan realisasi sebesar RP. 30.533.758.858,- atau 58.52 %

Program Kegiatan dan sub kegiatan hasil Pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto pada tahun 2023 pada BPKAD terbagi dalam 4 (empat) Program 15 (dua belas) kegiatan dan 71 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai mana tabel 2.1.2 berikut:

Tabel 2.1.2
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D SEMETER I TAHUN 2023
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023 (semester I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2023 (%)		Peninggung Jawab		
					APBD Awal		APBD Perubahan								
1			2	3	4		5		6		7				
			Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	2		KEUANGAN												
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB	Bulan	12	69,065,428,632	12	82,596,531,310	12	32,575,664,133	100.0%	47.17%		
5	2	1	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan OPD	Bulan	12	5,953,600	5,953,600	12	1,125,000	100.0%	18.90%	Sekretariat	
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,133,600	1	3,133,600	-	0.00%	0.00%	
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1,665,000	1	1,665,000	-	0.00%	0.00%	
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	1,125,000	2	1,125,000	100.0%	100.00%		
5	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan	Orang	49	6,414,766,683	42	6,146,863,790	12	2,736,326,813	24.4%	42.66%	Sekretariat
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	49	6,414,766,683	42	6,146,863,790	42	2,736,326,813	85.71%	42.66%
5	2	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya laporan barang milik daerah pada SKPD	Bulan	12	105,000	12	1,805,000	-	0.00%	0.00%	Sekretariat	
5	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	laporan	2	105,000	2	1,805,000	-	0.00%	0.00%	
5	2	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Yang Meningkatkan SDM nya	%	42	129,934,600	42	176,934,600	22	86,500,000	52.36%	98.88%	Sekretariat
5	2	1	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	1,934,600	2	1,934,600	-	0.00%	0.00%	
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	128,000,000	32	175,000,000	22	86,500,000	110.0%	99.92%
5	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	809,774,672	12	845,070,672	12	484,445,262	100.0%	59.82%	Sekretariat
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	12	19,563,064	12	19,563,064	3	6,561,125	25.00%	33.50%
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	12	131,230,008	12	131,230,008	6	36,834,600	50.00%	29.59%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023 (semester I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2023 (%)		Penanggung jawab					
			APBD Awal		APBD Perubahan		5		6							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Kegiatan/Sub Kegiatan			Output	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	12	81,903,600	12	81,903,600	6	22,716,050	50.00%	27.71%	
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	12	127,032,000	12	132,328,000	6	35,030,061	50.00%	27.58%	
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	350	449,946,000	350	479,946,000	118	381,303,426	33.71%	34.74%	
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang diadakan	Bulan	12	964,148,000	12	964,148,000	12	-	100.00%	0.00%	Sekretariat
5	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	4	964,148,000	4	964,148,000	-	-	0.00%	0.00%	
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	887,861,529	12	961,100,000	12	404,308,763	100.00%	45.54%	Sekretariat
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	15,250,000	12	6,500,000	6	1,325,000	50.00%	8.69%	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	82,468,629	12	48,600,000	6	20,362,865	50.00%	24.68%	
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	1	790,112,900	1	906,000,000	1	382,620,896	100.00%	48.43%	
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	366,412,900	12	286,941,400	12	113,535,513	100.00%	30.99%	Sekretariat
					Barang Milik Daerah yang Dipelihara		Bulan									
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	20	192,481,400	20	192,481,400	10	86,755,313	50.00%	45.07%	
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	2	82,471,500	2	8,000,000	-	-	0.00%	0.00%	
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	30	91,460,000	30	86,460,000	15	26,780,200	50.00%	29.28%	
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPIN BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Opini	WTP	38,399,262,015		72,025,551,715	WTP	28,561,176,509	WT	48.91%	
						PERSENTASE CAPAIAN REALISASI BELANJA (QUALITY OF BUDGET PLANNING (%))	%	90						0.00%		
						MAKSIMAL DEFISIT APBD (%)	%	3						0.00%		
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	Tepat Waktu		1,058,694,650	Tepat Waktu	1,058,694,650	Tepat Waktu	294,569,011	Tepat Waktu	27.82%	Bid. Anggaran
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	dokumen	2	206,049,850	2	206,049,850	1	96,400,000	50.00%	48.24%	

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023 (semester I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2023 (%)		Peninggung jawab					
								APBD Awal		APBD Perubahan		5		6							
								4													
1				2		3		K		Rp		K		Rp		K		Rp		7	
Kegiatan/Sub Kegiatan				Output		Satuan		K		Rp		K		Rp		K		Rp			
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disusun	dokumen	2		203,213,500	2		203,213,500			0.00%		0.00%			
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	laporan	27		20,436,000	27		20,436,000			0.00%		0.00%			
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA - SKPD yang Diverifikasi	laporan	27		30,061,900	27		30,061,900	27	16,345,745	100.00%		54.37%			
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA - SKPD yang Diverifikasi	laporan	27		16,664,300	27		16,664,300			0.00%		0.00%			
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA - SKPD yang Diverifikasi	laporan	27		21,669,900	27		21,669,900			0.00%		0.00%			
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	2		230,700,750	2		230,700,750			0.00%		0.00%			
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen	5		228,665,500	5		228,665,500	3	146,550,000	60.00%		64.08%			
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen	9		25,443,050	9		25,443,050	1	6,813,813	11.11%		26.78%			
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	orang	150		75,669,900	150		75,669,900	30	25,459,453	20.00%		33.63%			
5	2	2	2.02	2	Koordinasi dan Pengelolaan Pelembagaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	100		285,671,100			315,671,100	100		73,857,500	100.00%		25.85%	Bid. Perbendaharaan	
						Persentase capaian realisasi anggaran (%)	%	85			85		85	100.00%							
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	12		24,869,000	12		24,869,000	3	8,228,500	25.00%		33.09%			
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	dokumen	102		9,374,700	102		9,374,700	84	5,348,000	82.35%		57.05%			
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	dokumen	110		50,670,800	110		50,670,800	78	12,256,000	70.91%		24.19%			
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	dokumen	3		17,503,750	3		17,503,750	1	1,630,250	33.33%		9.31%			

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023 (semester I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2023 (%)		Penanggung jawab		
						APBD Awal		APBD Perubahan								
						1	2			3	4		5		6	
				Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	laporan	12	18,984,800	12	18,984,800	3	2,908,750	25.00%	15.32%	
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SF2D Dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	dokumen	27	13,204,700	27	13,204,700	27	1,176,000	100.00%	8.91%	
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	dokumen	12	93,819,600	12	123,819,600	6	26,401,000	50.00%	31.34%	
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	orang	250	57,243,750	250	57,243,750	80	12,909,000	32.00%	22.55%	
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang disampaikan tepat waktu (%)	%	100	188,235,800	100	228,718,200	100	71,122,532	100.00%	37.78%	Bid. Akuntansi
						Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	%	100		100						
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	laporan	2	14,963,300	2	14,963,300			0.00%	0.00%	
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	dokumen	131	14,012,600	131	14,012,600	54	5,307,381	41.22%	37.88%	
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	27	3,359,800	27	3,359,800	27	1,505,000	100.00%	44.79%	

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023 (semester I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2023 (%)		Peninggung jawab	
						APBD Awal		APBD Perubahan							
1				2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	7
				Kegiatan/Sub Kegiatan	Output	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Perca tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	dokumen	5	66,540,000	5	81,540,000	5	31,049,685	100.00%	46.66%	
5	2	2.03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	1	14,419,000	1	14,419,000	1	1,566,800			
5	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	dokumen	4	9,938,200	4	9,938,200			0.00%	0.00%	
				Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	dokumen	2	14,961,300	2	14,961,300	1	2,984,000		19.92%	
5	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Orang	140	49,961,600	140	75,474,000	26	26,709,666	18.57%	57.43%	
5	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa (%)	%	100	56,801,560,465	100	70,357,367,765	100	28,103,227,466	100.00%	49.48%	Sekretariat
					Realisasi Penyaluran Pembayaran Pinjaman Pemda (%)	%	100		100		100		100.00%		
5	2	2.04	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	laporan	2	1,250,000,000	2	1,275,000,000	1	552,787,395	50.00%	44.22%	
5	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	laporan	12	50,915,727,000	12	58,849,765,000	6	26,557,345,900	50.00%	52.16%	
5	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	laporan	12	3,382,909,465	12	8,979,658,765	6	491,924,571	50.00%	14.54%	
5	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	laporan	12	1,252,924,000	12	1,252,924,000	3	501,169,600	25.00%	40.00%	
5	2	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Data Base Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tahun	1	65,100,000	1	65,100,000	3	16,400,000	300.00%	28.26%	Bid. Anggaran
5	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Aplikasi	5	65,100,000	5	65,100,000	2	16,400,000	40.00%	28.26%	
5	2	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE OPD DENGAN LAPORAN BMD YANG AKURAT DAN AKUNTABEL	%	95	606,158,475	95	611,158,475	88	106,538,165	92.63%	18.07%	

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023 (semester I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2023		Penanggung jawab
								APBD Awal		APBD Perubahan				6 (%)		
1				2		3		4		5		6		7		
Kegiatan/Sub Kegiatan				Output	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5	2	3	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pencatatan dan pelaporan BMD sesuai aturan	%	90	606,158,475	90	611,158,475	90	105,538,165	100.00%	18.07%	Bid. Aset	
					Persentase penyelesaian terhadap temuan LHP BMD oleh Pemeriksaan BPK	%	90		90	90	100.00%					
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	dokumen	2	26,937,100	2	31,937,100	1	14,423,940	50.00%	53.55%	
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen	2	35,303,500	2	35,303,500	1	5,178,300	50.00%	14.67%	
					Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	dokumen	2	8,304,900	2	8,304,900	2	2,443,750	100.00%	29.43%	
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	Laporan	18	27,563,944	18	27,563,944	18	16,765,500	100.00%	71.66%	
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD	laporan	1	103,001,935	1	103,001,935	1	5,766,500	100.00%	5.60%	
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	laporan	1	358,744,583	1	358,744,583	1	42,588,160	100.00%	11.87%	
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	laporan	2	19,421,079	2	32,817,513	2	17,719,800	100.00%	91.24%	
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah kabupaten / Kota	orang	60	26,861,434	60	13,465,000	60	1,652,215	100.00%	6.15%	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN (FISKAL SPACE)	%	100	481,051,158	100	571,004,058	99.93	75,708,108	99.93%	15.74%	
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan	Persentase capaian target PAD	%	95	481,051,158	95	571,004,058	102	75,708,108	107.37%	15.74%	Bid. Pendapatan
						Persentase Capaian Target PAD dari PBB-P2 dan BPHTB	%	3.5		3.5		3.3		94.25%		
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	1	7,667,300	1	7,667,300				0.00%	
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Kebijakan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	dokumen	1	11,505,630	1	11,505,630	1	6,270,168	100.00%	54.50%	
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Pelebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	33,065,000	1	33,065,000	1	2,747,500	100.00%	8.31%	
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	unit	1	42,427,100	1	14,120,000			0.00%	0.00%	
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pencatatan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pencatatan Objek Pajak Daerah. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	51,159,400	12	81,159,400	6	23,284,500	50.00%	45.48%	
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	57,816,650	1	97,776,650	1	7,259,940	100.00%	12.56%	
5	2	4	2.01	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	dokumen	37	17,769,786	37	46,069,786			0.00%	0.00%	
5	2	4	2.01	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	12	12,858,286	12	12,858,286	3	2,833,000	25.00%	22.03%	

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023 (semester I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2023 (%)		Penanggung jawab
1				2		3		4		5		6		7		8
Kegiatan/Sub Kegiatan				Output		Satuan		APBD Awal		APBD Perubahan		K		K		
								K		Rp		K		Rp		
5	2	4	2.01	9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	dokumen	400	56,718,750	400	56,718,750	3	12,978,000	0.75%	22.88%	
5	2	4	2.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	dokumen	12	164,937,356	12	164,937,356	3	20,035,000	25.00%	12.15%	
5	2	4	2.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	dokumen	10	9,734,600	10	9,734,600		-	0.00%	0.00%	
5	2	4	2.01	12	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	15,311,300	2	15,311,300		300,000	0.00%	1.96%	
TOTAL									69,065,428,632		82,596,531,310		32,575,664,133		47.17%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah OPD BPKAD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal OPD, OPD BPKAD menggunakan analisis SWOT .

⇒ **Strenghts** (kekuatan), **Weaknesses** (kelemahan), **Opportunities** (peluang) dan **Threats** (ancaman).

SWOT yaitu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dipandang paling sesuai untuk diaplikasikan.

Analisis kondisi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto dapat diketahui dengan analisa dan metode SWOT.

Strength (kekuatan) internal

1. BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki kekuasaan dalam hal menyusun rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda Perubahan APBD dan Rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
3. BPKAD selaku pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan impelemntasi SIPD secara penuh mulai dari perencanaan, penatausahaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban.
4. BPKAD telah memiliki Aplikasi dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu Aplikasi SISMIOP PBB, Aplikasi E-BPHTB dan SIMPATDA yang sudah terkoneksi dengan Kas Umum Daerah pada Bank Nagari.

Weaknesses (kelemahan) internal

1. Kemampuan keuangan daerah masih rendah.
2. Belum sepenuhnya tergali potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki sehingga kontribusinya terhadap pendapatan secara keseluruhan masih rendah.
3. Ketergantungan penerimaan pendapatan daerah dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.
4. Adanya kecendrungan penurunan Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sedangkan kebutuhan daerah semakin meningkat.
5. Kurangnya fleksibilitas penggunaan TKDD oleh daerah karena pengaturan yang sangat ketat oleh Pemerintah Pusat untuk memenuhi mandatory spending.
6. Masih tingginya tingkat defisit dalam penyusunan APBD.
7. Mempertahankan Opini WTP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sawahlunto.
8. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian intern.
9. Perubahan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang terlalu cepat dapat menyulitkan dalam pelaksanaan dan implementasi di OPD.
10. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan terhadap OPD serta masyarakat, belum tersedia sarana prasarana gedung kantor BPKAD yang representatif.
11. Beban kerja yang cukup tinggi belum didukung oleh SDM yang memadai sehingga pekerjaan menjadi tumpang tindih karena pemanfaatan SDM yang ada.

Opportunities (peluang) eksternal

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa PPKD dalam hal ini BPKAD mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, menyusun rancangan Perda APBD/rancangan Perda perubahan APBD, dan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sehingga BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam hal memfasilitasi SKPD mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Adanya kerjasama dengan Bank Nagari dalam pengelolaan retribusi daerah berbasis elektronik dan penggunaan QRIS.
3. Adanya kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Pengelolaan PBB dan BPHTB.
4. BPKAD menjadi piloting dalam pelaksanaan SP2D online di Sumatera Barat yang bekerjasama dengan Bank Nagari.

Treats (ancaman) eksternal

1. Perubahan regulasi yang dinamis sehingga memerlukan banyak penyesuaian dalam Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD namun belum diikuti dengan dukungan sarana dan prasarana dan kondisi riil dilapangan.
2. Masih rendahnya komitmen dan kesadaran OPD dalam merealisasikan target pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga berpengaruh terhadap target realisasi pendapatan secara keseluruhan.

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah, maka kinerja dalam mendukung kinerja Pemerintah Daerah adalah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan target memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta dalam pengelolaan pendapatan daerah terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun Analisis Pencapaian Kinerja pelayanan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto 2021 s/d 2023

No	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Angka		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN									82,596,531,310	85,208,633,871	
1	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BERJALAN LANCAR DAN TERTIB (BULAN)			12	12	12	12			9,388,817,062	10,826,576,090	
	Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan OPD (bulan)				12	12	12			5,953,600	36,000,000	
	Jumlah program dan kegiatan OPD sesuai perencanaan (dokumen)				1							
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)					1	1			3,133,600	12,000,000	
	Jumlah program dan kegiatan OPD sesuai perencanaan (dokumen)				1							
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)					1	1			1,695,000	12,000,000	
	Jumlah dokumen laporan kinerja dan laporan tahunan yang tersusun (laporan)				2							
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)					2	2			1,125,000	12,000,000	
	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan)			12	13	49	49	12		6,146,863,790	6,913,626,090	
	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang difasilitasi (bulan)			12	13			12				
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)					42	49			6,146,863,790	6,913,626,090	
	Tersedianya laporan barang milik daerah pada SKPD (bulan)				12	12	12			1,805,000	9,075,000	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Angka		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah laporan barang OPD yang tersusun (bulan)				12						-	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD (lapcran)					2	2			1,805,000	9,075,000	
	Persentase Aparatur Yang Meningkatkan SDM nya (%)			34	85	42	42	20		176,934,600	152,075,000	
	Jumlah pejabat eselon yang wajib menyampaikan laporan kinerja (orang)				22						-	
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)					2	2			1,934,600	9,075,000	
	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal (orang)			34	30			20	30			
	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)					32	32			175,000,000	143,000,000	
	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)			12	12	12	12	12		845,070,672	920,150,000	
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (bulan)			12	12			12	12			
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)					12	12			19,583,064	30,250,000	
	Alat dan Bahan Kebersihan kantor yang disediakan (bulan)				12				12			
	Alat Tulis Kantor yang disediakan (bulan)			12	12			12	12		-	
	Dokumentasi dan Dekorasi yang disediakan (bulan)			12	12			12	12		-	
	Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (bulan)			12				12			-	
	Pembayaran Honorarium Cleaning Service BPKAD (orang)			4				2				
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)					12	12			131,230,008	159,500,000	
	Makanan dan Minuman yang disediakan (bulan)			12	12			12	12		-	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Angka		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan yang disusun (dokumen)			2	2	2	2	2	2	203,213,500	216,716,500	
	Jumlah SKPD yang di review (Laporan)			1				1				
	Jumlah Berita Acara verifikasi RKA SKPD (Berita Acara)				25				25			
	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)					27	27			20,436,000	43,479,700	
	Jumlah SKPD yang di review (Laporan)			1				1			-	
	Jumlah Berita Acara verifikasi Perubahan RKA SKPD (Berita Acara)				25			1	25			
	Jumlah Perubahan RKA - SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)					27	27			30,061,900	42,300,500	
	Jumlah SKPD yang di review (SKPD)			1				1			-	
	Jumlah Berita Acara verifikasi DPA SKPD (Berita Acara)				25				25			
	Jumlah DPA - SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)					27	27			16,694,300	33,000,000	
	Jumlah SKPD yang di review (SKPD)			1				1			-	
	Jumlah Berita Acara verifikasi Perubahan DPA SKPD (Berita Acara)				25				25			
	Jumlah Perubahan DPA - SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)					27	27			21,699,900	38,500,000	
	Jumlah dokumen APBD (dokumen)			6	5			6	5		-	
	Jumlah Perda dan Perwako APBD (dokumen)			2	2			2	2			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)					2	2			230,700,750	251,350,000	
	Jumlah dokumen Perubahan APBD (dokumen)			5				5			-	
	Jumlah Perda dan Perwako Perubahan APBD (dokumen)			5	2			5	2			
	Jumlah Perwako Perubahan Penjabaran APBD (dokumen)				3				3		-	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Angka		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)					5	5			228.695,500	251,350,000	
	Honorarium Non PNS/Sta' Bidang Anggaran (orang)			3				3				
	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga dan Petunjuk Teknis Penyusunan RKA (Dokumen)			2				2				
	Jumlah Peserta Sosialisasi Penganggaran Daerah dan Penyerahan DPA (orang)			500				240			-	
	Jumlah dokumen petunjuk Teknis Penyusunan RKA (dokumen)			2				2			-	
	Jumlah dokumen Standar Biaya (dokumen)				2				2		-	
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)					9	9			25.443,050	126,610,000	
	Jumlah Laporan Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah (laporan)				1				1		-	
	Jumlah Peserta Sosialisasi Penganggaran Daerah dan Penyerahan DPA (orang)				80				78			
	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)					150	150			75.699,900	76,890,000	
											-	
	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai aturan (%)			100	100	100	100	100	100	315.671,100	409,750,000	
	Persentase Capaian Realisasi Anggaran (%)			90	90	90	90	85	90		-	
	Persentase penyelesaian terhadap temuan LHP keuangan oleh Pemeriksaan BPK (%)			75				75				
	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan berpredikat baik (%)			60				60				
	Ketersediaan Dana Pelaksanaan APBD (bulan)			12				12			-	
	Laporan Rekonsiliasi Kas Daerah (laporan)				12				12		-	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Angka		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelola Kas Daerah (Dokumen)					12	12			24,868,000	54,450,000	
	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan (SPD)			87	175			76	175		-	
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (dokumen)					102	102			9,374,700	36,300,000	
	Jumlah laporan dana transfer (laporan)			28				28				
	Jumlah laporan pengelolaan dana transfer (laporan)				105				105			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya (Dokumen)					110	110			50,670,800	93,500,000	
	Jumlah laporan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank (laporan)				2				2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)					3	3			17,503,750	22,000,000	
	Laporan kasda, aliran kas, PFK (bulan)			12				12			-	
	Jumlah laporan aliran kas dan PFK (laporan)				12				12		-	
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)					12	12			16,984,800	37,950,000	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Angka		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Laporan gaji dan rekapitulasi SKPD (bulan)			12	12			12			-	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan dengan OPD (OPD)			26	25			26	25			
	Jumlah SP2D yang diproses (buah)			6750				4476				
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait (Dokumen)					27	27			13,204,700	22,000,000	
	Jumlah SPM GU OPD yang diverifikasi (dokumen)			800				840			-	
	Jumlah Dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan yang diterbitkan (dokumen)			10	10			10				
	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)			80	150			150				
	Jumlah SP2B yang diterbitkan (SP2B)				375			37				
	Jumlah SP2D yang diterbitkan (SP2D)				6500			4546			-	
	Jumlah SPM UP, GU, TU dan LS OPD yang diverifikasi (berkas)				7500			5532				
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)					12	12			123,819,800	72,050,000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota (Orang)					250	250			57,243,750	71,500,000	
											-	
	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang disampaikan tepat waktu (%)			100	100	100	100	100	100	228,718,200	340,547,900	
	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)			100	100	100	100	100	100		-	
	Jumlah laporan SAKD (laporan)			3				3			-	
	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah (laporan)				2				2		-	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Angka		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)					2	2			14,983,300	16,500,000	
	Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi dan verifikasi (berita acara)				312				312			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)					131	131			14,012,600	30,250,000	
	Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi (laporan)			12				12				
	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Kota (laporan)				12				12		-	
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)					27	27			3,359,800	25,397,900	
	Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Bidang Perbendaharaan (orang)			2				2			-	
	Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah (dokumen)			6	5			6	5		-	
	Jumlah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)					5	5			81,540,000	121,000,000	
	Jumlah temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang terselesaikan (dokumen)										-	
	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)					1	1			14,419,000	16,500,000	
	Laporan Hasil Tindak Lanjut TPKD (laporan)			2				2			-	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Angka		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Laporan Hasil Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR) (laporan)				3				2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)					4	4			9.938,200	59.400,000	
	Jumlah dokumen Perwako kebijakan dan sistem akuntansi yang tersusun (dokumen)				2				1		-	
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)					2	2			14.981,300	16.500,000	
	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)			104	140			90	140			
	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota (Orang)					140	140			75.474,000	55.000,000	
	Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa (%)			100	100	100	100	100	100	70.357.367,765	70.445.493,211	
	Realisasi Penyaluran Pembayaran Pinjaman Pemda (%)			100	100	100	100	100	100			
	Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman Pemda (kali)			2				2			-	
	Jumlah pembayaran bunga utang pinjaman pemda kepada pemerintah RI				2				2		-	
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)					2	2			1.275.000,000	1.375.000,000	
	Jumlah Desa (Desa)			27				27			-	
	Jumlah bantuan keuangan dana desa dan alokasi dana desa yang disalurkan kepada desa (desa)				27				27			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)					12	12			58.849.785,000	62.886.154,100	
	Jumlah OPD yang mengajukan Dana Darurat (OPD)			3				3			-	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Angka		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah OPD yang mengajukan belanja tidak terduga (OPD)				2				2		-	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)					12	12			8,979,658,765	4,821,200,411	
	Jumlah Desa (Desa)			27				27			-	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang disalurkan kepada Desa (Desa)				27				27		-	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota (Laporan)					12	12			1,252,924,000	1,363,138,700	
											-	
	Data Base Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (tahun)			4	3			3		65,100,000	68,200,000	
	Jumlah Sistem Aplikasi Keuangan Daerah yang dikelola (aplikasi)			4				4			-	
	Jumlah aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang dikelola (aplikasi)				3				3			
	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)					5	5			65,100,000	68,200,000	
											-	
3	PERSENTASE OPD DENGAN LAPORAN EMD YANG AKURAT DAN AKUNTABEL (%)			90	94	95	95	88		611,158,475	1,128,050,000	
	Persentase kesesuaian pencatatan dan pelaporan BMD sesuai aturan (%)			90	90	90	90	90		611,158,475	1,128,050,000	
	Persentase penyelesaian terhadap temuan LHP BMD oleh Pemeriksa BPK (%)			90	90	90	90	90			-	
	Jumlah dokumen standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang yang disusun (dokumen)			1	5			1	5		-	
	Jumlah Standar Harga yang Disusun (dokumen)					2	2			31,937,100	49,500,000	
	Jumlah dokumen Rencana Pemeliharaan/Perawatan BMD yang disusun (dokumen)			1	2			1	2		-	
	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun (dokumen)			1	2			1	2		-	

[illegible]

No	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Angka		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	PERSENTASE CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN (FISKAL SPACE) (%)			100	100	100	100	100	100	571,004,058	691,770,000	
	Persentase capaian target PAD (%)			95	95	95	95	95	95		-	
	Persentase capaian target PAD dari PBB-P2 dan BPHTB (%)			2.5%	2.5%	3.5	3.5	3.3			-	
	Jumlah dokumen potensi pajak daerah (dokumen)				2				2		-	
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)					1	1			7,687,300	12,000,000	
	Jumlah dokumen data kebijakan, data objek dan subjek PBB-P2 dan DHKP (dokumen)			38				38			-	
	Jumlah Laporan PBB dan BPHTB (laporan)			15				3			-	
	Jumlah dokumen Perda/Perwako Kebijakan pajak daerah (dokumen)				2				2		-	
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)					1	1			11,505,630	18,150,000	
	Jumlah Media Penyebarluasan Informasi (Media)			3	3			3	2		-	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)					1	1			33,065,000	48,400,000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan (jenis)			4	6			4	6		-	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)					1	1			14,120,000	48,400,000	
	Jumlah Data Objek Pajak dan Subjek PBB-P2 (objek pajak)			27200	27,350			27200	27,543		-	
	Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah (laporan)			12	12			12	12		-	
	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)					12	12			81,199,400	60,500,000	
	Jumlah data objek pajak dan subjek PBB P2 dan BPHTB yang dipelihara dan dimutakhirkan (objek pajak/OF)			27200				27200			-	

No	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Angka		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (Tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	Tahun 2021 (Tahun n-2)	Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tahun 2023 (tahun n)	Tahun 2024 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah dokumen database Pendapatan daerah (dokumen)			1				1			-	
	Jumlah Lapcran Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA MINERBA (laporan)			4				4			-	
	Jumlah Sistem Aplikasi Pendapatan yang dikelola (aplikasi)			1	3			1	3		-	
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)					1	1			97,776,650	90,750,000	
	Jumlah Nilai PBB-P2 dan BPHTB (miliar)			1.85				1.81			-	
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)										-	
	Jumlah Laporan Wajib Pajak (laporan)			12				12			-	
	Jumlah wajo pajak BPHTB yang ditetapkan (wajib pajak)				200				170		-	
	Jumlah wajo pajak daerah yang ditetapkan (wajib pajak)				440				475		-	
	Jumlah wajib pajak PBB yang ditetapkan (wajib pajak)				27,350				27,350		-	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)					37	37			46,089,786	30,250,000	
	Jumlah Pelayanan pajak dan Konsultasi Pajak Daerah (bulan)			12				12			-	
	Jumlah laporan pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (laporan)				12				12		-	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)					12	12			12,858,286	18,150,000	
	Honorarium Non PNS/Staf Administrasi Umum Bidang PBB (orang)			3				3			-	
	Jumlah Data objek pajak dan subjek PBBP2 dan BPHTB yang diperiksa (objek pajak)			27200				27200			-	
	Jumlah Lapcran Pendapatan Daerah (laporan)			12				12			-	
	Persentase dita objek pajak dan subjek PBB P2 dan BPHTB yang terverifikasi (%)				100				100		-	
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)					400	400			56,718,750	99,220,000	

[illegible]

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD BPKAD

Sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Kota Sawahlunto.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kota Sawahlunto masih menghadapi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini berpengaruh pada pencapaian kinerja pelayanan di masing-masing Bidang pada BPKAD Kota Sawahlunto.

Isu pembangunan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

Isu utama : - Isu Tata Kelola Pemerintahan
- Isu Pembangunan Ekonomi

Isu Strategis - Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan keuangan terutama dalam peningkatan pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya potensi Pendapatan Asli Daerah.
2. Belum optimalnya pelayanan-pelayanan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
3. Masih rendahnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban pajak dan membayar retribusi.
4. Ketergantungan Kota Sawahlunto terhadap penerimaan pendapatan daerah dari pemerintah pusat masih sangat tinggi, sehingga Pemerintah Kota Sawahlunto belum mampu menjadi kota mandiri dan masih sangat

bergantung pada bantuan pemerintah pusat berupa dana transfer/dana perimbangan maupun dari bantuan dari Pemerintah Provinsi.

5. Adanya kecenderungan penurunan Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sedangkan kebutuhan daerah semakin meningkat.
6. Kurangnya fleksibilitas penggunaan TKDD oleh daerah karena pengaturan yang sangat ketat oleh Pemerintah Pusat untuk memenuhi mandatory spending.
7. Masih tingginya tingkat defisit dalam penyusunan APBD.
8. Mempertahankan Opini WTP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sawahlunto.
9. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian intern.
10. Regulasi keuangan yang mengalami perubahan secara cepat dan terus menerus tidak diimbangi dengan kecepatan dalam pengimplementasian di daerah.
11. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam menunjang pelaksanaan tugas OPD.
12. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan terhadap OPD serta masyarakat belum tersedia gedung kantor yang representatif.

Berdasarkan isu-isu strategis diatas diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

- 1) BPKAD sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah Kota Sawahlunto mempunyai wewenang menyusun Rancangan tentang Penjabaran dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta menyusun Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sehingga BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam memfasilitasi SKPD mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD perlu diberikan dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dengan mengikuti ujian kompetensi/Diklat/ pelatihan/kursus-kursus.

- 2) Tersedianya Regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah (Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri, Perda dan lainnya) yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah.
- 3) Melakukan pendekatan persuasif dengan turun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi kepada masyarkat akan pentingnya kesadaran membayar pajak dan retribusi untuk pembangunan daerah.
- 4) Melakukan penilaian zona nilai tanah. Penilaian zona nilai tanah dilakukan untuk menyesuaikan nilai tanah suatu wilayah sesuai dengan nilai yang sebenarnya/wajar, karena nilai tanah/NJO tanah yang ada sebelumnya adalah merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh KPP Pratama antara tahun 2001 s/d 2003.
- 5) Menyiapkan Portal Pengecekan PBB-P2 (nop.sawahluntokota.go.id)
Portal ini dapat digunakan untuk melihat data objek pajak dan data wajib pajak dan portal ini juga akan menampilkan status piutang dan status pembayaran PBB-P2 yang telah dibayarkan, sehingga akan memudahkan wajib pajak melihat status PBB-P2nya.
- 6) Menyiapkan pembayaran PBB-P2 secara online melalui produk digital Bank Nagari. Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan pada setiap kanal digital Bank Nagari antara lain melalui *Mobile Banking*, Nagari Cas Managemen (NCM), ATM dan saat ini juga sudah dapat dilakukan pembayaran menggunakan *QRIS*, dimana *QRIS* telah dilounching secara resmi pada 13 Juni 2023
- 7) Penerbitan SSPD BPHTB secara *Online*
Dalam melakukan validasi terhadap BPHTB yang selama ini dilakukan secara manual, yang mana wajib pajak/kuasa wajib pajak hadir/datang ke Bidang Pendapatan, saat ini dapat dilakukan secara *online* melalui portal bphtb.sawahlunto.kota.go.id. kecuali untuk BPHTB Waris.

Untuk kelancaran dan memudahkan dalam proses pengurusan administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah tersedia aplikasi e-BPHTB yang terkoneksi dengan pembayaran online melalui semua media digital Bank Nagari serta sudah terkoneksi dengan ATR/BPN Kota Sawahlunto.

8. Untuk percepatan proses pengurusan, penanganan permasalahan aset tanah serta pengintegrasian data pertanahan dan perpajakan terutama dalam persertifikatan tanah yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto telah dilakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan Kanwil Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
9. Memonitor dan mengawasi pemungutan pajak dan retribusi daerah oleh Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah.
10. Melakukan pendataan terhadap objek pajak dan retribusi daerah yang baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada sehingga penerimaan daerah dapat dipungut secara optimal.
11. Meningkatkan sistem pengendalian internal di SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).

Propenas merupakan rencana induk perencanaan pembangunan nasional hasil konsesus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang membuat tercapainya visi dan misi bangsa.

Untuk mendorong pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan integrasi dan kebijakan daerah.

Untuk mewujudkan keselarasan antara Rencana Jangka Menengahan Daerah (RPJMD) dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah sehingga memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan untuk meningkatkan pembangunan di daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.2.1. Tujuan

Berdasarkan keselarasan visi dan misi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, tujuan yang selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto adalah tujuan RPD Nomor 4 yakni **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif”**

Sedangkan tujuan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas

3.2.2. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah:

Tujuan 1 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelola keuangan Daerah dengan indikator Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK
2. Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Manajemen Aset
3. Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Tujuan 3 sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah BPKAD dengan indikator Nilai SAKIP BPKAD

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh OPD sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, serta dana sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan SKPD, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan dengan anggaran indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 tertuang dalam Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 sebagaimana tabel 4.1 berikut.

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
					Capaian Program	Keluaran/ Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja BKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	12 Laporan	-	1.125.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1.161.250,00	
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6.414.716.683,00				6.913.626.006,00		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
				-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	55 Orang/bulan	-	6.414.716.683,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	6.913.626.000,00	
5	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							6.535.000,00				6.882.750,00		
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD												
				-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	2 Laporan	-	6.535.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.882.750,00	
5	02	01	2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah							138.030.000,00				144.900.000,00		
5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
				-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	2 Dokumen	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	10.500.000,00	
5	02	01	2.05	06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												

Kode				Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Teluk Ukur	Target	
				-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	- Kota Sewahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	20 Orang	-	128.010.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	134.400.000,00	
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							634.774.672,04				876.513.466,00		
5	02	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
				-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	- Kota Sewahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	19.543.064,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.562.217,00	
5	02	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
				-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	- Kota Sewahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	131.230.006,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	137.791.508,00	
5	02	01	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tinggal													
				-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tinggal yang Disediakan	-	- Kota Sewahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tinggal yang Disediakan	12 Paket	10.590.000,00	
5	02	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
				-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Kota Sewahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	81.913.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	86.062.780,00	
5	02	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
				-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	- Kota Sewahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	127.012.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	133.363.600,00	
5	02	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
		-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	12 Laporan	-	449.946.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pen yelenggaraan n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	472.443.300,00	
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Anjap Dinamis pada SKPD										
		-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Anjap Dinamis pada SKPD	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	12 Dokumen	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pa natausahaan Anjap Dinamis pada SKPD	12 Doku men	15.750.000,00	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					540.539.000,00					567.554.400,00
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	1 Unit	-	450.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	472.500.000,00	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel										
		-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	3 Unit	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	52.500.000,00	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
		-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	5 Unit	-	40.538.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	42.554.400,00	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					887.811.529,00					932.254.605,00
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	12 Laporan	-	15.230.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.012.500,00	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
					Capaian Program	Kelembagaan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program	Kelembagaan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
				-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	82.498.629,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86.623.560,00			
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
				-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	790.112.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	829.618.545,00			
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												366.412.900,00		384.733.545,00
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
				-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	23 Unit	-	192.411.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	23 Unit	202.105.470,00			
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
				-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	82.471.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2 Unit	86.595.075,00			
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
				-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	35 Unit	-	91.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	35 Unit	96.033.000,00			
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										58.396.246.215,00		61.253.552.853,00		
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										1.659.694.656,00		1.111.630.911,00		
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

Kode				Uraian / Bidang Uraian / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
					Capaian Program	Keluaran/ Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Telak Ukur	Target			
				-		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	-	-	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	206,049,850.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	216.352.342,00
5	02	02	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	-	-	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	203,213,500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	213.374.175,00
5	02	02	2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	-	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	-	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	28 Dokumen	-	20,438,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	21.457.800,00
5	02	02	2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	-	-	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	112 Dokumen	-	30,061,900.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	112 Dokumen	31.564.995,00
5	02	02	2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	-	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	-	-	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	28 Dokumen	-	16,694,300.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	17.529.645,00
5	02	02	2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	-	-	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	112 Dokumen	-	21,699,900.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	112 Dokumen	22.794.695,00
5	02	02	2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-	-	-	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	230.700.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	242.235.787,00
5	02	02	2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-	-	-		-		-						

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				-	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjelasan Perubahan APBD	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Dokumen	-	228.635.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen	240.130.275,00	
5	02	02	2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran													
				-	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Dokumen	-	25.413.950,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Dokumen	26.715.202,00	
5	02	02	2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
				-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	240 Orang	-	75.899.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan P enganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/K ota	240 Orang	79.484.895,00	
5	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										282.749.306,00	296.886.764,90		
5	02	02	2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													
				-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	24.919.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	26.112.450,00	
5	02	02	2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD													
				-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	78 Dokumen	-	9.574.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Peng endalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	78 Dokumen	9.843.435,00	
5	02	02	2.02 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
					-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	110 Dokumen	-	50.670.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	110 Dokumen	53.204.340,00			
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank															
					-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	17.593.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	3 Dokumen	18.378.937,00			
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)															

[illegible]

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tokok Ukur	Target			
					-	Jumlah Perunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	10 Dokumen	-	93.819.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10 Dokumen	98.510.580,00			
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota															
					-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	240 Orang	-	57.243.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	240 Orang	60.105.937,00			
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							189.235.800,00				197.647.590,00				
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah															
					-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	2 Laporan	-	14.993.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	15.742.965,00			
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-L/O dan Beban															
					-	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-L/O, dan Beban	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	131 Dokumen	-	14.012.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-L/O, dan Beban	131 Dokumen	14.713.230,00			
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah															

[illegible]

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
				-	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	14.301.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	15.730.365,00		
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota													
				-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	150 Orang	-	49.991.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	52.491.180,00		
5	02	02	2.04		Peningkatan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah											58.891.516.465,00		59.579.138.488,00
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah													
				-	Jumlah Laporan Hasil Analisa Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	1.250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Analisa Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2 Laporan	1.250.000.000,00		
5	02	02	2.04	06	Analisis Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan													
				-	Jumlah Laporan Hasil Analisa Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	50.915.727.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Analisa Perencanaan dan Penyusunan Bantuan Keuangan	12 Laporan	53.461.513.350,00		
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
				-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	3.382.916.465,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	3.532.054.838,00		
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Teknik Ukur	Target	
		-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten Kota	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	1.252.914.000,00	Dana Transfer Umum+Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupa- ten Kota	12 Laporan	1.315.570.200,00
5	02	02	2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					65.000.000,00					68.250.000,00
5	02	02	2.05	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah										
		-	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Dokumen	-	65.000.000,00	Dana Transfer Umum+Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeli- haraan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5 Dokumen	68.250.000,00
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					636.119.475,00					667.966.397,00
5	02	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah					636.119.475,00					667.966.397,00
5	02	03	2.01	Penyusunan Standar Harga										
		-	Jumlah Standar Harga yang Disusun	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	26.917.100,00	Dana Transfer Umum+Dana Alokasi Umum		Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	28.293.955,00
5	02	03	2.01	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah										
		-	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum+Dana Alokasi Umum		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	15.750.000,00
5	02	03	2.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah										
		-	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	35.303.500,00	Dana Transfer Umum+Dana Alokasi Umum		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	37.068.675,00
5	02	03	2.01	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah										
		-	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	8.314.900,00	Dana Transfer Umum+Dana Alokasi Umum		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	8.726.145,00
5	02	03	2.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah										

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Capaian Program	Keluaran/ Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target
					-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	18 Laporan	-	27.513.944,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pen atausahaan Barang Milik Daerah	18 Laporan	28.963.141,00
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah												
					-	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	12 Laporan	-	103.011.935,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	108.152.031,00
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah												
					-	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	1 Laporan	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	15.750.000,00
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah												
					-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	1 Laporan	-	358.744.583,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengend alian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	376.681.812,00
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah												
					-	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	28 Laporan	-	19.421.079,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	28 Laporan	20.392.133,00
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota												
					-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	65 Orang	-	28.911.434,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/K ota	65 Orang	28.294.505,00

Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					619.631.159,00				545.003.713,00			
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					619.631.159,00				545.003.713,00			
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah												
					-	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	1 Dokumen	-	7.517.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokum en	8.071.665,00	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah												
					-	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	1 Dokumen	-	11.595.630,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembang an Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokum en	12.080.911,00	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah												
					-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	1 Laporan	-	33.065.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyeba ruasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	34.718.250,00	
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah												
					-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	2 Unit	-	42.427.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	44.548.455,00	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah												
					-	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	12 Laporan	-	151.119.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	53.759.370,00	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah												

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub- Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keberasan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Outsat Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keberasan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					-	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	1 Laporan	-	57,816,650.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	90,707,482.00	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)													
					-	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUPD nya	-	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	500 Obyek Pajak	-	25,000,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUPD nya	500 Obyek Pajak	26,250,000.00	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah													
					-	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah	-	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	37 Dokumen	-	17,709,786.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah	37 Doku men	18,679,275.00	
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
					-	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	12 Layanan	-	12,608,286.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layana n	13,591,200.00	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah													
					-	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	-	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	400 Dokumen	-	56,718,750.00	-	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	400 Dok umen	59,554,687.00	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah													
					-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	12 Dokumen	-	164,937,356.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Doku men	173,184,223.00	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah													
					-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	-	- Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	-	12 Dokumen	-	9,734,600.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Doku men	10,221,330.00	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Penguasaan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah													

Kode					Urutan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Pendring	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran/Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
					-	Jumlah Laporan Hasil Pembiayaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	- Kota Sewahlnto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	2 Laporan	-	15,311,300.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pembiayaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	16,076,865.00		
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah										Jumlah Laporan Perk embangan El ektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Laporan	13,650,000.00		
					-	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	- Kota Sewahlnto, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	-	3 Laporan	-	13,040,000.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
TOTAL													68,858,812,232.00						72,312,363,948.00

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Sawahlunto		68,853,802,232				72,312,363,948
5 02	KEUANGAN		Sawahlunto		68,853,802,232				72,312,363,948
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	NILAI EVALUASI SAKIP OLEH INSPEKTORAT	Sawahlunto	B	9,207,352,384	APBD		B	9,845,840,985
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi capaian kinerja program/kegiatan (%)	Sawahlunto	100	13,453,600	APBD		100	19,376,280
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Sawahlunto	2	12,500,000	APBD		2	13,125,000
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	Sawahlunto	1	3,133,600	APBD		1	3,290,280
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Sawahlunto	1	1,695,000	APBD		1	1,779,750
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Sawahlunto	12	1,125,000	APBD		12	1,181,250
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah terhadap anggaran kas (%)	Sawahlunto	95	6,414,766,683	APBD		95	6,913,626,000
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Sawahlunto	55	6,414,766,683	APBD		55	6,913,626,000

5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan barang milik daerah (%)	Sawahlunto	100	5,555,000	APBD		100	6,882,750
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Sawahlunto	2	6,555,000	APBD		2	6,882,750
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian: Perangkat Daerah	Persentase ASN yang berkapasitas (%)	Sawahlunto	100	138,000,000	APBD		100	144,900,000
5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Sawahlunto	2	10,000,000	APBD		2	10,500,000
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Sawahlunto	20	128,000,000	APBD		20	134,400,000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik (%)	Sawahlunto	80	834,774,672	APBD		80	876,513,405
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Sawahlunto	12	19,583,064	APBD		12	20,562,217
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sawahlunto	12	131,230,008	APBD		12	137,791,508
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Sawahlunto	12	10,000,000	APBD		12	10,500,000
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Sawahlunto	12	81,983,600	APBD		12	86,082,760
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Sawahlunto	12	127,032,000	APBD		12	133,383,600
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sawahlunto	12	449,946,000	APBD		12	472,443,300
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Sawahlunto	12	15,000,000	APBD		12	15,750,000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik (%)	Sawahlunto	100	540,528,000	APBD		100	567,554,400
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Sawahlunto	1	450,000,000	APBD		1	472,500,000
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Sawahlunto	3	50,000,000	APBD		3	52,500,000

5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sawahlunto	5	40,528,000	APBD		5	42,554,400
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik (%)	Sawahlunto	80	887,861,529	APBD		80	932,254,605
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Sawahlunto	12	15,250,000	APBD		12	16,012,500
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Sawahlunto	12	82,498,629	APBD		12	86,623,560
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Sawahlunto	12	750,112,900	APBD		12	825,618,545
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset yang terpelihara (%)	Sawahlunto	100	365,412,900	APBD		100	384,733,545
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Sawahlunto	23	192,481,400	APBD		23	202,105,470
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sawahlunto	2	82,471,500	APBD		2	86,595,075
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)	Sawahlunto	35	91,460,000	APBD		35	96,033,000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD)	Sawahlunto	76	58,395,240,215	APBD		77	61,253,552,853
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	Sawahlunto	Tepat Waktu	1,058,694,650	APBD		Tepat Waktu	1,111,630,011
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	Sawahlunto	2	206,049,850	APBD		2	216,352,342
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	Sawahlunto	2	203,213,500	APBD		2	213,374,175
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	Sawahlunto	28	20,436,000	APBD		28	21,457,800
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	Sawahlunto	112	30,061,900	APBD		112	31,564,955

5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	Sawahlunto	28	16,694,300	APBD		28	17,529,645
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	Sawahlunto	112	21,699,900	APBD		112	22,784,855
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	Sawahlunto	2	230,700,750	APBD		2	242,235,787
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	Sawahlunto	5	228,695,500	APBD		5	240,130,275
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	Sawahlunto	10	25,443,050	APBD		10	26,715,202
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Ferencaraan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota (Orang)	Sawahlunto	240	75,699,900	APBD		240	79,484,855
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	Sawahlunto	5	282,749,300	APBD		4.5	296,886,764
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	Sawahlunto	12	24,869,000	APBD		12	26,112,450
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	Sawahlunto	78	9,374,700	APBD			9,843,435
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	Sawahlunto	110	50,670,800	APBD		110	53,204,340
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	Sawahlunto	3	17,503,750	APBD		3	18,378,937

5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	Sawahlunto	12	16,063,000	APBD			16,866,150
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	Sawahlunto	12	13,204,700	APBD		12	13,864,935
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	Sawahlunto	10	93,819,600	APBD		10	98,510,580
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota (Orang)	Sawahlunto	240	57,243,750	APBD		240	66,105,937
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (%)	Sawahlunto	100	183,235,800	APBD		100	197,647,590
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	Sawahlunto	2	14,993,300	APBD		2	15,742,965
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	Sawahlunto	131	14,012,600	APBD		131	14,713,230
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, ELUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	Sawahlunto	28	3,359,800	APBD		28	3,527,750

5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	Sawahlunto	5	66,540,000	APBD		5	66,867,000
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	Sawahlunto	1	14,419,000	APBD		1	15,139,950
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	Sawahlunto	4	9,938,200	APBD		4	10,435,110
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	Sawahlunto	2	14,981,300	APBD		2	15,730,365
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	Sawahlunto	150	49,991,600	APBD		150	52,491,180
5	02	02	2.04		Pemungjung Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan urusan kewenangan daerah dan bantuan yang tersalurkan (%)	Sawahlunto	100	56,801,560,465	APBD		100	59,579,138,488
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	Sawahlunto	2	1,250,000,000	APBD		2	1,250,000,000
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	Sawahlunto	12	50,915,727,000	APBD		12	53,461,513,350
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	Sawahlunto	12	3,382,909,465	APBD		12	3,552,054,938
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	Sawahlunto	12	1,252,924,000	APBD		12	1,315,570,200
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrua	Sawahlunto	Ada	63,000,000	APBD		Ada	68,280,000

5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	Sawahlunto	5	65,000,000	APBD		5	66,250,000
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE OPD DENGAN LAPORAN BMD YANG AKURAT DAN AKUNTABEL (%)	Sawahlunto	95	635,158,475	APBD		95	667,966,397
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pencatatan dan pelaporan BMD sesuai aturan (%)	Sawahlunto	90	635,158,475	APBD		90	667,966,397
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	Sawahlunto	2	26,937,100	APBD		2	28,283,955
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	Sawahlunto	2	15,000,000	APBD		2	15,750,000
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	Sawahlunto	2	35,303,500	APBD		2	37,068,675
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	Sawahlunto	2	8,304,900	APBD		2	8,720,145
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	Sawahlunto	18	27,583,944	APBD		18	28,963,141
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	Sawahlunto	12	103,001,935	APBD		12	108,152,031
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	Sawahlunto	1	15,000,000	APBD		1	15,750,000
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	Sawahlunto	1	358,744,583	APBD		1	376,681,812
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	Sawahlunto	28	19,421,079	APBD		28	20,392,133
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	Sawahlunto	65	26,861,434	APBD		65	28,204,505

5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE KONTRIBUTSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)	Sawahlunto	11.74	619,051,158	APBD		12.35	545,003,713
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD (%)	Sawahlunto		619,051,158	APBD			545,003,713
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	Sawahlunto	1	7,687,300	APBD		1	8,071,665
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	Sawahlunto	1	11,505,630	APBD		1	12,080,911
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	Sawahlunto	1	33,065,000	APBD		1	34,718,250
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	Sawahlunto	2	42,427,100	APBD		2	44,548,455
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	Sawahlunto	12	151,199,400	APBD		12	53,759,370
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	Sawahlunto	1	57,816,650	APBD		1	60,707,482
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)	Sawahlunto	500	25,000,000	APBD		500	26,250,000
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	Sawahlunto	37	17,789,786	APBD		37	18,679,275
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	Sawahlunto	12	12,858,286	APBD		12	13,501,200
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	Sawahlunto	400	56,718,750	APBD		400	59,554,687
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	Sawahlunto	12	164,937,356	APBD		12	175,184,223
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	Sawahlunto	12	9,734,600	APBD		12	10,221,330

5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Sawahlunto	2	15,311,300	APBD		2	16,076,865
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	Sawahlunto	3	13,000,000	APBD		3	13,650,000
									68,858,802,232				72,312,363,948

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Tahun 2024-2026 untuk menunjang tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 serta target dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Sawahlunto.

Rencana Kerja ini memiliki catatan penting yang perlu mendapat perhatian terutama untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Program Pengelolaan Pendapatan dengan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya.

Upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan kebijakan strategis pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

- 1) Sinkronisasi program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat sehingga memperoleh dukungan sumber dana.
- 2) Kinerja Pemerintah Daerah yang berhasil kembali dipertahankan yaitu diperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2022 untuk yang ke-8 (delapan) kali yang diserahkan pada tanggal 12 Mei 2023.

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Sawahlunto mendapat apresiasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang mana telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan telah mengikuti Regulasi yang telah ditetapkan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto untuk mempertahankan Opini WTP adalah dengan senantiasa melakukan perbaikan sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pengawasan dan menindaklanjuti temuan yang menjadi rekomendasi pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kota Sawahlunto.

Pemerintah Kota Sawahlunto akan selalu berkomitmen untuk mempertahankan WTP sebagai perwujudan pengelolaan keuangan yang baik, bersih dan akuntabel.

1. Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah wajib menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi dalam pelayanan informasi Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kota Sawahlunto merupakan daerah pertama di Sumatera Barat yang melaksanakan penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) secara keseluruhan mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan.

Pemerintah Kota Sawahlunto mulai bulan September 2022 telah berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri RI dan PT.Bank Nagari Cabang Sawahlunto untuk melakukan persiapan dalam Implementasi pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online sehingga mendapat kepercayaan dari Kemendagri bahwa Kota Sawahlunto ditunjuk sebagai daerah piloting dalam pelaksanaan SP2D online.

Pada tanggal 10 April 2023 telah dilaksanakan penandatanganan kerjasama (MoU) antara Pemerintah Kota Sawahlunto dengan PT.Bank Nagari Cadang Sawahlunto untuk pelaksanaan SP2D Online gaji dan Non gaji dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Pada tanggal 13 Juni 2023 telah dilaksanakan Launching dan Sosialisasi SP2D online sekaligus launching penggunaan QRIS Pajak dan Retribusi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

2. Pemerintah Kota Sawahlunto juga berhasil mendapatkan penghargaan DJPb Awards dalam pengelolaan keuangan daerah dalam penyaluran Dana Desa yaitu penghargaan bagi daerah tercepat ke dua dalam pengajuan dan penyaluran Dana Desa tahun 2023.

Dana Desa merupakan salah satu komponen dana transfer untuk dimana dalam penyaluran ke daerah di dahului dengan persyaratan yang menuntut optimalisasi kinerja antara Pemerintah Kota dengan semua unsur dalam Pemerintahan desa dan SKPD yang terkait.

3. Kinerja yang juga mendukung pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kota Sawahlunto dapat menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tetap waktu setiap tahun anggaran sesuai dengan Pasal 312 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dimana proses perencanaan dan penganggaran telah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, sehingga APBD dapat berfungsi sebagai otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam pengelolaan keuangan.

Sedangkan upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dilakukan adalah :

1. Melakukan pendekatan persuasif dengan turun langsung ke lapangan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran membayar pajak dan retribusi untuk pembangunan daerah.

2. Melakukan penilaian zona nilai tanah. Penilaian zona nilai tanah dilakukan untuk menyesuaikan nilai tanah suatu wilayah sesuai dengan nilai yang sebenarnya/wajar, karena nilai tanah/NJO tanah yang ada sebelumnya adalah merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh KPP Pratama antara tahun 2001 s/d 2003.
3. Menyiapkan Portal Pengecekan PBB-P2 (nop.sawahluntokota.go.id)
Portal ini dapat digunakan untuk melihat data objek pajak dan data wajib pajak dan portal ini juga akan menampilkan status piutang dan status pembayaran PBB-P2 yang telah dibayarkan, sehingga akan memudahkan wajib pajak melihat status PBB-P2nya.
4. Menyiapkan pembayaran PBB-P2 secara online melalui produk digital Bank Nagari. Pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan pada setiap kanal digital Bank Nagari antara lain melalui *Mobile Banking*, Nagari Cas Managemen (NCM), ATM dan saat ini juga sudah dapat dilakukan pembayaran menggunakan *QRIS*, dimana *QRIS* telah dilounching secara resmi pada 13 Juni 2023
5. Penerbitan SSPD BPHTB secara *Online*
Dalam melakukan validasi terhadap BPHTB yang selama ini dilakukan secara manual, yang mana wajib pajak/kuasa wajib pajak hadir/datang ke Bidang Pendapatan, saat ini dapat dilakukan secara *online* melalui portal bphtb.sawahlunto.kota.go.id. kecuali untuk BPHTB Waris.
6. Untuk kelancaran dan memudahkan dalam proses pengurusan administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah tersedia aplikasi e-BPHTB yang terkoneksi dengan pembayaran online melalui semua media digital Bank Nagari serta sudah terkoneksi dengan ATR/BPN Kota Sawahlunto.

7. Untuk percepatan proses pengurusan, penanganan permasalahan aset tanah serta pengintegrasian data pertanahan dan perpajakan terutama dalam persertifikatan tanah yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto telah dilakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan Kanwil Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
8. Memonitor dan mengawasi pemungutan pajak dan retribusi daerah oleh Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sekaligus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah.
9. Melakukan pendataan terhadap objek pajak dan retribusi daerah yang baru dan pendataan ulang terhadap objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada sehingga penerimaan daerah dapat dipungut secara optimal.

Demikian dokumen perencanaan tahunan ini dibuat, untuk menjadi bahan usulan prioritas program dan kegiatan tahun 2023, dan akhir kata semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, karunia serta bimbingan kepada kita semua, Amin

Sawahlunto, September 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO



Kfrmy
AFRIDARMAN, SE

NIP. 19730710 200312 1 004